

STUDI EVALUASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA TENGAH TAHUN 2005

Nenik Woyanti

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

Human Development Index (HDI) is a composite value of 3 indicators, namely Life Expectancy at Birth, Literacy Rate, Mean Years of Schooling and Real Expenditure per Capita. This study researched HDI in Central Java in 2005 comprising of 35 regencies. The Development Programs had supported HDI positively. Life expectancy at birth in 2005 increased 2 years from 2001; Literacy rate in 2005 higher 4,1 percent than in 2001; Mean years of schooling in 2005 better than 2001 (from 6,1 to be 6,6 years); and real expenditure per capita in 2005 increased Rp 72.200,- from 2001 that was about Rp 549.200,-. The all 4 components of HDI indicated the progress of its general provincial development. However, the Local Government had to improve the health service facilities, increase the quantity and quality the education facilities, encourage the real expenditure per capita through better economic performance, open more job opportunities and increase its regional income.

Keywords: Human Development Index, Central Java.

LATAR BELAKANG

Isu pembangunan manusia akhir-akhir ini telah menjadi isu sentral. Sehingga konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dasar. Konsep pembangunan manusia menuntut terjadinya reformasi atas kemampuan dan pemampuan manusia yang terlihat melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan, serta daya beli, sehingga penduduk memperoleh manfaatnya, terutama dalam hal produktifitas, pemerataan, pemberdayaan dan kesinambungan. Menurut David C. Korten (2001) pembangunan yang berpusat pada penduduk menempatkan manusia dan lingkungan sebagai variabel endogen yang utama, yaitu sebagai titik tolak dalam pembangunan. Lyncolyn Arsyad (2004) menambahkan bahwa pembangunan menempatkan penduduk sebagai titik pusat dari segenap gerak pembangunan sekaligus modal dasar kekuatan faktor dominan dan sasaran utama pembangunan. Dengan kata lain penduduk atau masyarakat tidak saja berperan sebagai subyek namun sekaligus sebagai obyek dalam pembangunan. Pendapat yang sama disampaikan oleh Moeljanto (1996) yang menjelaskan bahwa penduduk mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa

pembangunan menempatkan penduduk dalam fungsinya sebagai *resource* pembangunan.

Pembangunan menghendaki adanya perubahan kualitas manusia menjadi lebih baik (dari kualitas yang lebih rendah menjadi lebih tinggi tingkatannya). Perbaikan kualitas ini diharapkan akan dapat dicapai masyarakat adil dan makmur merata secara materiil maupun spirituil. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut diperlukan perbaikan kualitas fisik penduduk, karena peningkatan kualitas fisik penduduk berarti pula peningkatan taraf hidup penduduk. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yang berpijak pada produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Dinamika kependudukan mempunyai keterkaitan dan saling berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di segala bidang (Abdul Haris 2001).

Proses pembangunan yang terus dilaksanakan demi segera terwujudnya tujuan pembangunan di segala bidang ternyata tidak bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan. Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menjadi penghambat proses pembangunan. Provinsi Jawa Tengah pun menerima imbas krisis ekonomi, dimana IPM Jawa Tengah pada

tahun 1996 yang semula sebesar 67 persen akhirnya turun menjadi 64 persen pada tahun 1999 (Aloysius 2002). Untunglah, krisis moneter tidak begitu berdampak pada komponen pendidikan. Komponen pendidikan cukup terbantu karena telah meningkatnya persepsi masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin akan pentingnya pendidikan. Ironisnya, meskipun komponen pendidikan dari IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan, namun peningkatan ini tidak cukup menolong IPM untuk tidak 'tenggelam' oleh drastisnya penurunan daya beli masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, proses pembangunan terus berjalan. Hasil pembangunan membawa daerah pada kondisi yang semakin baik, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya IPM. Tahun 2002 IPM telah mengalami perbaikan meskipun perbaikan tersebut belum mampu menyamai tingkat IPM periode sebelumnya, hingga kemudian tahun 2005 krisis moneter telah lama berlalu. Banyak upaya perbaikan di berbagai aspek untuk memperbaiki IPM kemudian mengevaluasinya agar ke depan menjadi lebih baik. Jadi, tulisan ini ditujukan untuk [1] menganalisis faktor pembentuk

Indeks Pembangunan Manusia, dan [2] mengevaluasi pencapaian IPM itu di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005.

METODE

Lokasi studi evaluasi Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2004-2005 adalah seluruh wilayah kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kantor Statistik baik dari Jawa Tengah maupun Pusat (terutama Susenas, Sensus Penduduk), BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, BAPERMAS, Dinas KIMPRASWIL, Dinas NAKERTRANS dan Bappeda. Data-data yang dikumpulkan meliputi data tentang: angka harapan hidup, rata-rata tahun sekolah, angka melek huruf, konsumsi per kapita, proporsi penduduk yang memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Disamping data sekunder, akan dilakukan pula diskusi yang mendalam dengan instansi yang terkait guna mendapatkan hasil yang baik.

Tabel 1. Nilai Maksimum Dan Minimum Dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata lama Sekolah (tahun)	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Daya Beli	737,720	300,000 (1996) 360,000 (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

Sumber: BPS, Bappenas & UNDP 2001

Alat yang digunakan dalam analisis dan evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2004-2005 adalah analisis isi (content analysis). Alat ini pun digunakan untuk merumuskan hasil diskusi. Selanjutnya untuk mengevaluasi data Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada masing-masing kabupaten/ kota dilakukan analisis kuantitatif dan diskriptif sederhana. Rumus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = Human Development Index

(HDI):

$$IPM = HDI = 1/3 (IK + IP + IDP)$$

Di mana

IPM/HDI: Indeks Pembangunan Manusia/ Human Development Index;

IK: Indeks Kesehatan = Indeks Usia Harapan Hidup Saat Lahir;

IP: Indeks Pendidikan = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama

Sekolah);

IDP: Indeks Daya Beli = Indeks Standar Hidup Layak.

Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli diperoleh melalui formula umum berikut (UNSFIRS 2000):

Dimana,

X_i = Indikator ke- i

$X_{i \max}$ = Nilai Maksimum X_i

$X_{i \min}$ = Nilai Minimum X_i

Tabel 1 menyajikan nilai maksimum dan minimum komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai minimum merupakan angka terendah dari masing-masing komponen IPM yang pernah dialami oleh suatu negara di dunia ini, demikian pula nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari masing-masing komponen IPM yang bisa dicapai oleh suatu negara.

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kan ukuran keberhasilan pembangunan aspek manusia dalam suatu wilayah tertentu yang standarnya ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP (*United Nation of Development Program*). Ukuran ini selanjutnya disepakati dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu, seperti negara, propinsi atau kabupaten/kota. Pada dasarnya IPM menetapkan standar-standar minimal yang sangat sederhana sehingga dapat dikatakan sebagai prasyarat minimal yang harus dicapai oleh suatu negara atau wilayah pada kurun waktu tertentu.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang dibentuk dari 3 indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas sosial, yakni indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita. IPM pada dasarnya menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang direpresentasikan melalui Angka Harapan Hidup, perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, Morris D Morris mengemukakan Physical Quality of Life Indeks (PQLI) atau indeks kualitas hidup (IKH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator; tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek

huruf (Lincolyn Arsyad 2004) dan terus dikembangkan oleh UNDP PBB 1990 dengan nama indeks pembangunan manusia, dimana indikator kriteria HDI merupakan perluasan dari PQLI. Indikator yang digunakan adalah: (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, (3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara. Masing-masing indeks besarnya antara 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan jika indeks semakin mendekati 1 itu berarti indeks pembangunan manusianya tinggi, demikian juga sebaliknya (Lincolyn Arsyad 2004).

Penggunaan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara atau daerah bukan tanpa kelemahan. Menurut Michael Todaro (2001), seorang ahli ekonomi, kelemahan penggunaan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan adalah:

1. IPM bersifat relatif dan bukannya absolut, artinya suatu negara atau daerah akan dinilai IPM-nya dibandingkan dengan negara-negara/daerah lain. Artinya, jika semua negara atau daerah mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama, maka negara-negara miskin/daerah-daerah miskin tidak naik peringkatnya, sehingga tidak memperoleh penghargaan/pengakuan atas usahanya memperbaiki kualitas SDM nya.
2. IPM hanya mencakup satu aspek saja dari tujuan pembangunan. Banyak aspek lain yang tidak masuk kedalam perhitungan, seperti kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pendapatan. Dengan kata lain, IPM bukan merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif
3. IPM sebagai indikator pembangunan yang mengutamakan sumberdaya manusia ternyata tidak mencakup seluruh indikator tentang sumberdaya manusia. Kendala yang dihadapi biasanya adalah karena ketiadaan data.

Adapun kerangka pemikiran perwujudan paradigma Pembangunan Manusia disajikan dalam Gambar 1.

Pengukuran IPM

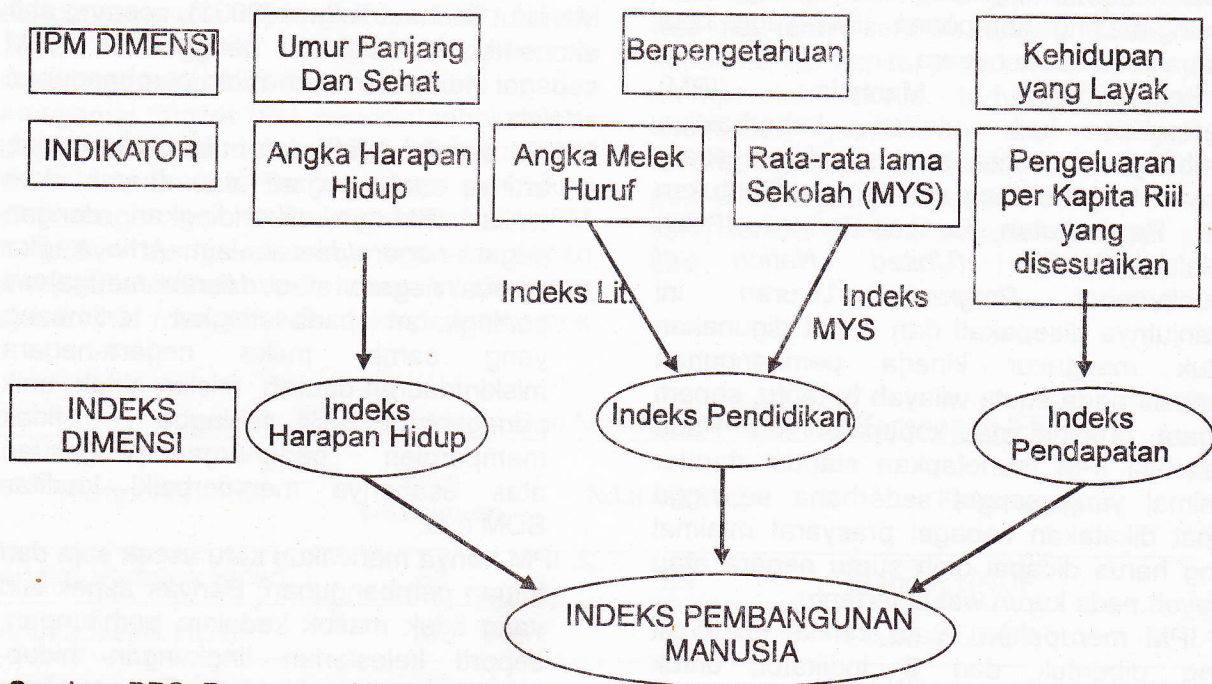
Human Development Report (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia, yang meliputi

Lamanya Hidup (*longevity*), Pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*) dan Standar Hidup (*decent living*). Pada tahun 1990 HDR pertama menyusun IPM berdasarkan pada pendapatan nasional (sebagai pendekatan dari standar hidup) dan dua indikator sosial, yakni angka harapan hidup (sebagai ukuran lamanya hidup) serta angka melek huruf usia dewasa (sebagai ukuran pengetahuan).

HDR kedua pada tahun 1991 menambahkan satu indikator baru rata-rata (tahun) lama bersekolah ke dalam

komponen pengetahuan (diberi bobot sepertiga) dan angka melek huruf (diberi bobot dua per tiga). Tambahan indikator ini merupakan pengakuan akan pentingnya pembentukan ketrampilan tingkat tinggi serta membantu pembedaan negara-negara yang mengelompok pada peringkat atas. Dalam HDR 1995 variabel lama sekolah diganti dengan rasio enrollment gabungan antara sekolah dasar, SLTP dan SMA/SMK, karena angka ini lebih mudah diperoleh dan tidak perlu perhitungan yang kompleks.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Paradigma Pembangunan Manusia



Sumber: BPS, Bappenas, UNDP 2004

Dalam penetapan indikator yang mewakili standar hidup layak, HDR pertama menggunakan PDB riil per kapita yang disesuaikan. Salah satu indikator ekonomi utama yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan adalah GDP perkapita. GDP perkapita adalah perbandingan antara GDP dengan jumlah populasi penduduk. Dalam penghitungannya digunakan metode *Purchasing Power Parity* (PPP) riil sebagai alat pengkonversi (dalam dolar AS), karena jika digunakan kurs nominal akan menyebabkan kesalahan dalam melakukan perbandingan kinerja pembangunan antar negara. GDP PPP riil diperoleh dari GDP yang dikonversikan dalam mata uang dolar AS menggunakan metode PPP, sehingga

GDP tersebut mempunyai daya beli yang sama dengan dolar di Amerika Serikat. GDP perkapita dengan metode PPP umumnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan GDP perkapita dengan kurs nominal (Mudrajad Kuncoro 2000).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 –79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 –65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005, jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 32.208.850 jiwa atau 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia, yang menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak.

Kondisi Pendidikan

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca-tulis penduduk dewasa, yang ditunjukkan oleh angka melek huruf. Pada tahun 2005 angka melek huruf penduduk Indonesia telah mencapai 87,4 persen. Dengan demikian, masih terdapat 12,6 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah rata-rata tahun sekolah, yang dapat menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Dengan rata-rata tahun sekolah sebesar 6,6 tahun pada tahun 2005, menunjukkan bahwa penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Jawa Tengah baru pada taraf menamatkan Sekolah Dasar. Di Provinsi Jawa Tengah rata-rata tahun sekolah lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata tahun sekolah tingkat nasional (7,3). Pada tahun 2001, rata-rata tahun sekolah 6,1 tahun dan terus mengalami peningkatan sampai dengan 6,6 tahun pada tahun 2005. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi pada tahun 2005 sebanyak jadi 915.656 orang (3,82 persen).

Faktor pencetus masih rendahnya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi antara lain karena beban biaya yang tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi berpengaruh terhadap kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki tingkat pendidikan penduduk. Faktor pencetus lainnya adalah karena terbatasnya daya tampung jenjang sekolah tingkat atas yang ada. Data tahun 2005 menunjukkan jumlah sekolah dasar di Jawa Tengah sebanyak 23.930, sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 4.056 dan SMA sebanyak 2.053 (BPS 2005).

Kondisi Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang akan mempengaruhi tingkat derajat kesehatan penduduk setempat antara lain jumlah puskesmas, kemampuan Puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, puskesmas/poliklinik, dokter dan tenaga medis yang lain di Jawa Tengah berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah (2005) nampaknya masih perlu ditingkatkan. Jumlah rumah sakit yang ada di Jawa Tengah baik rumah sakit pemerintah maupun swasta hanya 195 unit dengan kapasitas tempat tidur 18.436 tempat tidur. Jumlah pra sarana ini digunakan untuk melayani 31.397.431 pasien. Angka ini masih jauh dari standar pelayanan minimal.

Jika jumlah dokter per puskesmas dikaitkan dengan jumlah dokter per 10.000 penduduk, maka dapat diprediksi kemampuan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Makin banyak jumlah dokter per puskesmas asumsinya akan makin baik pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikian pula makin besar imbalan antar dokter per 10.000 penduduk asumsinya akan makin baik pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah mencapai 831 Puskesmas dan yang mampu untuk rawat inap mencapai 219 Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sekitar 1.824, serta 800 Puskesmas Keliling. Selanjutnya jumlah dokter Puskesmas mencapai 1.399 orang dengan rata-rata jumlah dokter per Puskesmas mencapai 1,77.

Angka Harapan Hidup (AHH) sangat dipengaruhi oleh pertolongan kelahiran pertama pada bayi, lama menyusui balita sampai 24 bulan lebih dan program gerakan sayang ibu. Pertolongan kelahiran pertama pada bayi di Jawa Tengah pada tahun 2005 sebanyak 2.546.770 yang dilakukan tenaga medis mencapai 1.776.301 tindakan dan yang dilakukan tenaga non medis sebanyak 770.469 tindakan.

Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu 2001 hingga 2005 meskipun fluktuatif namun relatif terus membaik. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin progresifnya laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 terutama pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 laju pertumbuhan PDRB adalah 5,13 persen.

Ditinjau dari angka nominal diketahui bahwa PDRB Jawa Tengah pada tahun 2005 atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp 135.789,872 milyar, sementara itu pada tahun 2000 PDRB hanya sebesar 114.701,304 milyar. Dengan demikian, nilai PDRB pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2000 menunjukkan perkembangan yang positif sebesar 118,39 persen.

Secara agregat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bersifat dinamis. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi cukup menggembarakan yakni sebesar 5,13 persen. Angka ini lebih besar dari tahun 2004 (4,98%). Berdasar distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2000, pada tahun 2004 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,40 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 6,41 persen.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2001-2005

No	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rerata Lama Sekolah		Pengeluaran Riil per Kapita		Indeks Pembangunan Manusia	
		2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005	2001	2005
1	Cilacap	67,1	69,5	84,5	90,0	5,9	6,5	549,3	619,0	65,7	69,5
2	Banyumas	68,6	69,4	88,1	93,3	6,0	6,9	549,2	621,5	67,4	70,7
3	Purbalingga	66,6	68,5	85,8	93,0	5,7	6,0	549,2	620,1	65,6	69,3
4	Banjarnegara	68,9	68,2	81,9	85,0	5,1	5,8	549,1	620,8	65,5	67,3
5	Kebumen	62,8	68,7	87,0	88,9	6,0	6,5	549,2	618,9	64,0	68,9
6	Purworejo	63,0	68,9	83,8	86,5	6,4	7,0	549,2	623,0	63,7	69,1
7	Wonosobo	67,7	68,9	87,1	85,1	5,6	5,7	549,2	619,3	66,4	67,6
8	Magelang	66,9	69,7	84,8	89,4	6,4	6,7	549,2	619,1	66,1	69,9
9	Boyolali	71,4	70,0	78,2	84,2	5,8	7,1	549,2	619,5	66,6	69,0
10	Klaten	68,3	70,7	80,8	85,0	6,9	7,7	549,2	637,2	66,3	71,4
11	Sukoharjo	73,8	69,7	81,0	86,4	7,2	7,8	549,2	635,2	69,7	71,2
12	Wonogiri	67,4	71,9	73,2	78,5	5,2	6,1	549,2	631,5	62,9	69,0
13	Karanganyar	71,7	71,8	76,0	81,1	6,3	7,0	549,3	637,0	66,7	70,7
14	Sragen	72,4	71,7	71,9	72,6	5,8	5,9	549,2	620,2	65,8	66,6
15	Grobogan	68,6	69,0	81,4	86,6	5,3	6,2	549,1	617,6	65,4	68,2
16	Blora	67,7	70,9	75,1	81,2	5,2	5,9	549,1	617,0	63,4	67,9
17	Rembang	60,9	69,1	81,6	87,4	5,2	5,9	549,2	626,1	61,1	69,0
18	Pati	74,4	72,6	81,2	83,8	5,9	6,4	549,2	632,8	69,0	70,9
19	Kudus	72,9	69,2	84,6	88,9	6,5	7,3	549,2	621,6	69,4	70,0
20	Jepara	69,4	70,2	86,6	87,2	6,4	6,9	549,3	620,3	67,8	69,6
21	Demak	68,5	69,5	84,3	89,3	6,2	6,6	549,2	619,3	66,7	69,4
22	Semarang	71,8	72,1	87,8	91,6	6,3	7,0	549,2	622,9	69,4	71,9
23	Temanggung	72,0	72,0	90,0	93,2	6,2	6,5	549,2	622,2	69,9	71,8
24	Kendal	65,2	66,7	84,9	88,4	5,4	6,6	549,2	622,5	64,4	67,5
25	Batang	66,4	69,1	83,4	85,1	5,4	5,8	549,1	618,8	64,7	67,6
26	Pekalongan	66,0	67,7	81,4	86,4	5,5	6,0	549,2	630,2	64,1	68,2
27	Pemalang	63,7	66,4	80,5	85,5	5,4	5,8	549,2	620,4	62,6	66,3
28	Tegal	68,2	67,4	82,3	86,4	5,5	6,2	549,2	622,0	65,6	67,5
29	Brebes	63,2	66,3	79,7	80,1	4,8	4,9	549,2	619,7	61,7	64,3
30	Kt.Magelang	75,1	69,7	93,8	94,5	9,2	10,0	549,3	638,9	74,7	74,7
31	Kt.Surakarta	74,0	71,7	94,1	95,8	9,2	9,8	549,3	638,4	74,1	76,0
32	Kt.Salatiga	74,0	70,3	93,8	95,2	8,9	9,5	549,4	638,0	73,9	74,8
33	Kt.Semarang	74,1	71,8	94,4	95,1	9,2	9,6	549,4	633,2	74,3	75,3
34	Kt.Pekalongan	69,8	69,1	89,3	94,7	7,6	8,3	549,3	622,0	69,5	71,9
35	Kt.Tegal	72,6	67,9	89,8	91,4	7,3	7,8	549,3	639,0	71,0	71,4
	Jawa Tengah	68,6	70,6	83,3	87,4	6,1	6,6	549,2	621,4	66,4	69,8

Sumber: BPS 2006.

Sementara itu, berdasar data yang berhasil dihimpun oleh BPS (2005) diketahui bahwa kondisi perkembangan pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar selama kurun waktu 2001 hingga 2005 nampaknya terus meningkat. Demikian juga dengan perkembangan PDRB per kapita. Namun demikian, secara umum ternyata pendapatan regional per kapita selalu lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di setiap tahunnya. Pada tahun 2005, pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp 3.516.794, naik 4,36 persen dari tahun 2004. Sedangkan untuk PDRB per kapitanya lebih besar yaitu Rp 5.919.959, atau naik 11,27 persen dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran Konsumen per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 172.685. Jika angka pengeluaran rata-rata per kapita ini dipecah berdasarkan domisili penduduk, terlihat rata-rata pengeluaran per kapita di perkotaan senantiasa lebih besar dibanding dengan yang di perdesaan, yakni Rp 212.034 di perkotaan dan Rp 143.572 di perdesaan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di perdesaan jika dibandingkan dengan pengeluaran di perkotaan adalah 67,71 persen.

Evaluasi IPM Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 bila dibandingkan dengan IPM tahun 2001 nampak terjadi kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 3,4 persen.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kenaikan angka IPM adalah peningkatan semua komponen pembentuk IPM, yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Menurut Tabel 3 untuk Angka Harapan Hidup tahun 2001 dibandingkan dengan tahun 2005 terjadi kenaikan sebesar 2 tahun yakni dari 68,6 tahun menjadi 70,6 tahun. Komponen pendidikan juga terdapat kenaikan angka. Khusus angka melek huruf terjadi kenaikan 4,1 persen, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah kenaikan sebesar 0,5 tahun. Adapun untuk

komponen pengeluaran riil per kapita juga terjadi kenaikan walaupun relatif kecil yakni sebesar Rp 72.200, dengan rincian pada tahun 2001 besarnya pengeluaran riil per kapita adalah Rp 549.200, dan naik menjadi Rp 621.400 pada tahun 2005.

Gambaran mengenai Angka Harapan Hidup (AHH) di ketiga puluh lima kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum menunjukkan indikator yang terus membaik dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Kenaikan AHH pada tahun 2005 pada umumnya mengikuti pola kondisi AHH pada tahun 2001, dan hanya terdapat sedikit variasi pada sebagian kecil kabupaten/ kota. Kecenderungan positif dengan meningkatnya AHH pada semua Kabupaten/Kota ini tentunya juga tercermin pada profil AHH untuk tingkat propinsi.

Fluktuasi AHH terjadi di beberapa daerah seperti misalnya Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kabupaten Pati. Meskipun demikian jika mendasarkan pada azas kenormalan data maka perbandingan AHH tahun 2001 hingga tahun 2005, tampak cukup representatif untuk menunjukkan trend yang membaik pada semua kabupaten/ kota. Dengan demikian tidak banyak terjadi perubahan peringkat pada dua kurun waktu tersebut dimana peringkat terendah diduduki oleh Kabupaten Brebes, sedangkan peringkat tertinggi tetap diduduki oleh Kabupaten Pati.

Angka Harapan Hidup urutan pertama adalah di Kabupaten Pati dan urutan terakhir di Kabupaten Brebes. Namun dalam perjalanan waktu menunjukkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pati justru menurun dari tahun 2001 (74,4) menjadi 72,6 pada tahun 2005, sedangkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Brebes justru meningkat dari 63,2 pada tahun 2001 menjadi 66,4 pada tahun 2005. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi dari fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut. Di Kabupaten Pati mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit (1.197.856 jiwa) dibanding Kabupaten Brebes (1.784.094 jiwa), tetapi fasilitas kesehatan lebih baik di Kabupaten Pati dari pada di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Pati jumlah rumah sakit mencapai 7 unit dengan kapasitas tempat tidur 616 buah.

Sedangkan di Kabupaten Brebes jumlah rumah sakit ada 5 unit dengan kapasitas tempat tidur 253 buah. Selanjutnya jika dilihat persentase status gizi anak balita ternyata di Kabupaten Pati anak balita yang berstatus gizi baik mencapai 87,69%, dan di Kabupaten Brebes hanya mencapai 78,81%.

Indikator kedua dari Indeks Pembangunan Manusia, yaitu Angka Melek Huruf, mengalami peningkatan dari tahun ketahun selama periode tahun 2001-2005. Daerah-daerah yang menduduki peringkat bawah pada tahun 2001, justru menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2005. Sebaliknya daerah-daerah yang menempati posisi tinggi tidak banyak mengalami peningkatan. Meskipun demikian, kecenderungan peningkatan pada umumnya terjadi secara konsisten dari tahun 2001 hingga tahun 2005.

Angka Melek Huruf di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 83,3 persen pada tahun 2001 menjadi 87,4 persen pada tahun 2005. Peningkatan ini tidak terjadi di semua daerah kabupaten/ kota. Hanya beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan yang berarti, seperti Kabupaten Sukoharjo dari peringkat 27 tahun 2001 menjadi peringkat 17 pada tahun 2005, Kabupaten Pemasang dari peringkat 29 tahun 2001 menjadi peringkat 23 tahun 2005. Kabupaten Kebumen, Kudus dan Boyolali juga mengalami peningkatan yang berarti dalam capaian Angka Melek Huruf selama jangka waktu 2001-2005. Kabupaten Wonosobo, Tegal dan Batang mengalami penurunan peringkat pada tahun 2005 bila dibandingkan dengan tahun 2001, masing-masing dari 10 menjadi 21, 21 menjadi 31 dan 20 menjadi 29.

Angka Melek Huruf di Kota Salatiga tahun 2005 menempati ranking pertama yaitu 96,6 persen. Angka ini merupakan kenaikan bila dibandingkan tahun 2001 yang hanya sebesar 93,8 persen. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kota Salatiga dapat meningkatkan angka capaian melek huruf. Namun kenaikan angka melek huruf di Kota Salatiga tidak membawa perubahan dalam posisi IPM pada tingkat Jawa Tengah (sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 tetap peringkat 4). Angka melek huruf di Kabupaten Sragen menempati peringkat terakhir (35) di Jawa Tengah. Angka Melek Huruf di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi sejak tahun 2001 dan selalu berada di posisi terakhir dalam skala

Jawa Tengah. Pada tahun 2001 Angka Melek Huruf di Kabupaten Sragen 71,9 persen, meningkat menjadi 74,5 persen pada tahun 2002 dan menurun selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi 73,3 persen tahun 2003 dan 72,6 persen pada tahun 2004. Pada tahun 2005 angka melek huruf di kabupaten Sragen meningkat menjadi 75,2 persen namun kenaikan ini masih belum mampu merubah posisi Kabupaten Sragen pada tingkat Jawa Tengah.

Berbeda dengan indikator Angka Melek Huruf, indikator lain yang juga masih berkaitan dengan pendidikan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan sedikit fluktuasi pada semua kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2001 sampai dengan 2005. Pola peningkatan yang terjadi pada tahun 2005 juga hampir sama dengan kondisi masing-masing daerah pada tahun 2001, sehingga tidak banyak terjadi perubahan posisi peringkat diantara kedua periode tersebut. Posisi peringkat kabupaten/ kota dalam hal Rata-rata Lama Sekolah juga hampir sama dengan posisi peringkat daerah-daerah tersebut dalam hal Angka Melek Huruf. Dalam hal ini Kabupaten Sragen dan Blora menduduki peringkat rendah, sementara Kota Salatiga dan Semarang berada pada posisi terbaik.

Dengan kondisi yang membaik pada semua kabupaten/ kota, maka profil Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Tengah juga menunjukkan trend yang terus membaik dari tahun 2001 sampai dengan 2005. Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) di Jawa Tengah belum mengalami peningkatan yang cukup berarti. Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Tengah pada tahun 2001 adalah 6,1 tahun hanya meningkat menjadi 6,8 tahun pada tahun 2005, artinya mayoritas penduduk Jawa Tengah berpendidikan baru sampai tamat Sekolah Dasar atau kelas 1 SMP. Kabupaten Rembang, Kendal, Boyolali, Wonogiri dan Semarang mengalami peningkatan peringkat pada tahun 2005 bila dibandingkan dengan tahun 2001. Kabupaten Rembang pada tahun 2001 menempati peringkat 33 meningkat menjadi peringkat 22 tahun 2005. Kabupaten Kendal menjadi lebih baik peringkatnya yaitu dari 27 tahun 2001 menjadi 21 pada tahun 2005, sedangkan Kabupaten Boyolali dari peringkat 21 tahun 2001 menjadi peringkat 16 pada tahun 2005. Kabupaten Wonogiri berubah peringkatnya dari 31 tahun 2001 menjadi 26 tahun 2005 dan Kabupaten Semarang

berubah menjadi peringkat 9 pada tahun 2005 bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang menduduki peringkat 14.

Terdapat beberapa kabupaten yang mengalami penurunan peringkat angka Rata-rata Lama Sekolah pada tingkat Jawa Tengah selama kurun waktu 2001-2005. Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari peringkat 24 tahun 2001 menjadi peringkat 34 tahun 2005. Kabupaten lain yang mengalami penurunan peringkat antara lain kabupaten Tegal (dari peringkat 19 ke peringkat 24), Demak (dari peringkat 15 menurun menjadi peringkat 20) dan Cilacap (dari peringkat 19 menjadi peringkat 24).

Kota Semarang dan Kota Surakarta menempati peringkat pertama dengan angka Rata-rata Lama Sekolah 9,8 tahun, sedangkan Kabupaten Brebes menempati peringkat terakhir (35) dengan angka Rata-rata Lama Sekolah 5,5 tahun. Mayoritas penduduk Kota Semarang dan Surakarta telah menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes hanya menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD).

Kota Semarang dan Kota Surakarta memiliki Rata-rata Lama Sekolah yang sama baik pada tahun 2001 (9,2 tahun) maupun tahun 2005 (9,8 tahun). Banyaknya sekolah pada tingkat lanjutan di kedua kota tersebut menjadi faktor meningkatnya a Rata-rata Lama Sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Brebes juga mengalami peningkatan dari 4,8 pada tahun 2001 menjadi 5,5 pada tahun 2005. Namun perubahan tersebut belum dapat mengantarkan Kabupaten Brebes untuk naik peringkat (tetap pada peringkat 35).

Perbedaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi pendidikan akan menghasilkan keluaran yang berbeda pula. Pemerintah daerah yang *concern* dengan pendidikan akan melakukan program dan kegiatan yang menunjang perbaikan pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu, memberikan dukungan penuh pada program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga pendidikan.

Kondisi perekonomian penduduk yang dideteksi melalui komponen Pengeluaran Riil Per Kapita di 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada

tahun 2001 angka pada masing-masing daerah hampir sama yaitu pada kisaran Rp 550.000. Fluktuasi terjadi antara tahun 2001 dan 2005 dalam rentang kisaran antara Rp 594.200 hingga Rp 619.900. Pada tahun 2002 pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 594.200, dan mengalami penurunan pada tahun 2003 hingga menjadi Rp 593.000. dan kembali membaik pada tahun berikutnya, yakni menjadi Rp 618.700. Fluktuasi pengeluaran riil per kapita antara lain disebabkan oleh fluktuatifnya pendapatan riil masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada peningkatan harga-harga barang secara umum. Pendapatan riil yang menurun berimplikasi pada penurunan pengeluaran riil per kapita.

Pada tahun 2005, angka pengeluaran riil per kapita meningkat, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2004, peningkatannya terlihat jauh lebih kecil. Sebab pada periode 2003-2004 kenaikan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp 25.700. Sedangkan untuk periode 2004-2005 kenaikan pengeluaran riil per kapita hanya sebesar Rp 1.200.

Dilihat pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah pengeluaran riil saling berpacu atas kedudukan rangkingnya. Kota Magelang tahun 2001 menduduki ranking ke 6 untuk besarnya pengeluaran riil per kapita dan dapat bertahan pada ranking pertama sampai pada tahun 2005. Pengeluaran riil per kapita Kota Tegal meningkat terus sejak tahun 2001 yang mencapai Rp 549.200 sampai pada tahun 2005 yang mencapai Rp 619.900. Peningkatan pengeluaran riil per kapita di Kota Tegal yang progresif ini mampu mengantarkan Kota Tegal mencapai peringkat pertama se Propinsi Jawa Tengah dalam hal daerah yang berhasil memiliki nilai pengeluaran riil per kapita yang tertinggi. Pada tahun 2001 Kota Tegal sementara berada pada peringkat 9, kemudian stabil pada peringkat 6 pada dua tahun perikutnya (2002-2003) dan pada tahun 2004 peringkat semakin membaik dengan berhasil menempati urutan ke dua di antara 34 kabupaten. Peningkatan peringkat pengeluaran riil per kapita di Kota Tegal antara lain disebabkan oleh semakin membaiknya roda perekonomian di daerah tersebut, dimana pemerintah kota Tegal dalam menarik minat investor asing dan domestik terbilang berhasil, yang ditunjukkan dengan semakin membaiknya kondisi sektor

industri, perdagangan dan pertanian di Kota Tegal, yang merupakan wilayah strategis sebab terletak di pesisir pantai utara yang merupakan kawasan perlintasan transportasi darat dan laut antar provinsi.

Kabupaten Blora tampaknya malah merosot dari ranking ke 34 pada tahun 2001 menjadi ranking 35 pada tahun 2005. Pengeluaran riil kabupaten Blora berfluktuasi sejak tahun 2001 sampai tahun 2005. Pada tahun 2001 pengeluaran riil per kapita Kabupaten Blora mencapai Rp 549.100; tahun 2002 naik menjadi Rp 586.600; tahun 2003 menurun menjadi Rp 584.100; tahun 2004 naik menjadi Rp 606.100 ; dan naik lagi menjadi Rp. 617.000 pada tahun 2005. Peningkatan pendapatan riil per kapita di Kabupaten Blora tidak lepas dari usaha keras dari pemerintah daerah setempat dalam membenahi dan memperbaiki kondisi perekonomian melalui penetapan kebijakan, implementasi strategi dan mewujudkan langkah-langkah konkret atas program ekonomi yang telah disusun. Namun upaya dan langkah-langkah positif di bidang ekonomi tersebut ternyata belum membuahkan hasil. Hal ini nampak dari posisinya yang berada pada urutan terakhir diantara 35 kabupaten/ kota se Jawa Tengah. Meskipun demikian secara absolut, usaha keras pemerintah Kabupaten Blora sudah cukup memuaskan, yang ditunjukkan dengan semakin membaiknya angka pengeluaran riil per kapita yang naik dan mencapai Rp 617.000 pada tahun 2005.

Pengeluaran riil per kapita di Propinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan hingga 2005, meskipun peningkatannya dirasa belum cukup berarti, yakni sebesar Rp 1.200 saja dari tahun 2004 yang sebesar Rp 618.700 menjadi Rp 619.700 pada tahun 2005. Pada tahun 2005 daerah-daerah yang mengalami peningkatan yang cukup menonjol secara absolut yang ditunjukkan dengan posisi peringkat yang berada pada kisaran 15 besar di antara 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah adalah Kota Tegal, Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Kabupaten, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Rembang, Pati, Semarang, Kendal, dan Pekalongan. Lima daerah di Jawa Tengah yang memiliki pengeluaran riil per kapita paling rendah atau berada pada ranking lima terbawah khusus pada tahun 2005 urutannya adalah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Batang, Grobogan dan Blora. Jika dicermati, kelima kabupaten tersebut

ternyata merupakan wilayah yang untuk sementara ini masih didominasi oleh keunggulan sektor pertanian dan industri, yang didalamnya terdiri dari sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan perkebunan, serta sub sektor industri kecil an rumah tangga. Sebagaimana diketahui, bahwa sektor pertanian yang banyak diandalkan oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia, tergolong sebagai sektor primer. Sektor primer merupakan sektor yang memiliki nilai tambah yang relatif rendah dalam proses produksinya dibandingkan dengan sektor sekunder, misalkan kegiatan industri pengolahan, dan sektor tersier misalkan kegiatan di bidang pelayanan atau jasa. Sektor sekunder dan tersier membutuhkan modal yang cukup besar, teknologi canggih, dan menuntut produktivitas yang relatif tinggi dari sumber daya manusia yang diberdayakan. Tuntutan dan kebutuhan yang mendukung tersebut apabila terpenuhi akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tambah dalam proses produksi. Artinya nilai tambah yang dihasilkan juga akan tinggi. Kondisi sosial dan ekonomi seperti ini yang bergerak secara dinamis dan berlangsung secara kontinyu, selanjutnya akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor industri meskipun merupakan sektor yang juga diminati oleh lima kabupaten yang berada pada posisi lima terendah di Jawa Tengah, namun demikian sebagian besar industri yang berjalan di kabupaten tersebut masih bergerak pada sub sektor industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga yang meskipun mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun sumbangan terhadap PDRB dan nilai tambahnya relatif kecil.

Dukungan sektor pertanian dan industri yang bekerja pada lima daerah yang disebut di atas, masih relatif kecil dan ketersediaannya masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tentu saja ini akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah. Dan secara spesifik, juga akan berpengaruh pada besarnya pengeluaran riil perkapita. Jadi, ada kecenderungan daerah yang masih memprioritaskan sektor pertanian akan memiliki nilai pengeluaran riil per kapita yang relatif rendah, apabila dibandingkan dengan daerah lain yang sudah memprioritaskan sektor industri dan

jasa yang tetap didukung oleh sektor pertanian.

Kabupaten Cilacap, Kebumen, Batang, Grobogan dan Blora yang hingga kini masih memprioritaskan sub sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta sub sektor industri kecil dan rumah tangga, memiliki nilai pengeluaran riil per kapita yang lebih rendah daripada nilai rata-rata pengeluaran riil per kapita se Jawa Tengah yang mencapai Rp 619.900. Selanjutnya nilai rata-rata per riil per kapita ini digunakan pemerintah daerah Jawa Tengah sebagai salah satu faktor penimbang dalam penentuan besaran UMP (Upah Minimal Propinsi). Karena Blora merupakan daerah yang berada pada posisi paling bawah atau ranking ke-35 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka dapat menjadi indikasi bahwa Kabupaten Blora merupakan daerah yang memang memiliki nilai pengeluaran riil per kapita terkecil. Ironisnya, selama empat tahun terakhir, mulai 2002 hingga 2005, Blora selalu menduduki posisi paling bawah dalam besaran pengeluaran riil perkapita. Dimana kondisi seperti ini tidak terjadi pada empat kabupaten yang rendah lainnya. Apabila ditinjau dari kekayaan alam. Kabupaten Blora selama ini memang dikenal sebagai daerah yang memiliki wilayah hutan jati yang sangat dan memiliki kandungan gas alam yang potensial. Namun pada kenyataannya, kekayaan hutan tersebut merupakan aset negara yang eksplorasi dan pengelolannya dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk turut memanfaatkan dan mengkonservasi guna menggalang besarnya nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Adapun potensi gas alam hingga kini masih dalam tahap penetapan kesepakatan dan perencanaan yang disinyalir kelak akan dieksploitasi dan dikelola oleh investor asing yang pembiayaannya berasal dari PMA. Apabila kelak pemerintah daerah dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam, dengan lebih banyak mempekerjakan masyarakat setempat, yang diikuti dengan kemungkinan munculnya aglomerasi yang berdampak positif bagi perekonomian, diharapkan Kabupaten Blora akan memiliki pengeluaran riil per kapita yang lebih tinggi, akhirnya posisi ranking pengeluaran riil per kapita Kabupaten Blora dapat terangkat, mendekati rata-rata pengeluaran riil per

kapita Jawa Tengah atau bahkan melampauinya.

Secara umum, guna meningkatkan pengeluaran riil per kapita masing-masing daerah yang nantinya akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang nyata, dapatlah diambil langkah konkret melalui penetapan tujuan pembangunan, implementasi strategi dan pelaksanaan program pada sektor-sektor pendukung, yakni pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil/menengah, penanaman modal, pertambangan dan energi.

Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah jika dirujuk ke kategori peringkat IPM, maka termasuk menengah tinggi (66-70). Sementara jika dilihat perbedaan IPM antar kabupaten/ kota di Jawa Tengah, ada kecenderungan menurun. Hal ini tampak pada kesenjangan IPM terendah dengan tertinggi yang mencapai 13,6 pada tahun 2001, dan akhirnya turun menjadi 10,4 pada tahun 2005.

KESIMPULAN

1. Ada 3 (tiga) komponen penting dalam penyusunan Indeks pembangunan Manusia (IPM) yaitu lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*), dan standar hidup (*decent living*).
2. Angka Harapan Hidup penduduk Jawa Tengah dari tahun 2001 hingga 2005 terus meningkat. Pada tahun 2001 Angka Harapan Hidup sebesar 68,6 tahun dan pada tahun 2005 menjadi 70,6 tahun, yang berarti terjadi kenaikan 2 tahun.
3. Pada tahun 2005 Angka Melek Huruf penduduk Indonesia telah mencapai 87,4 persen, yang berarti terjadi kenaikan 4,1 persen dibandingkan pada tahun 2001.
4. Rata-rata lama bersekolah Jawa Tengah sebesar 6,6 tahun pada tahun 2005, dimana angka ini lebih besar 0,5 tahun dibanding tahun 2001. Rata-rata lama bersekolah Jawa Tengah tahun 2005 yang sebesar 6,6 tahun mempunyai arti bahwa mayoritas penduduk yang berusia 10 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau kelas 1 SMP.
5. Kondisi perekonomian di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah semakin membaik. Namun demikian peningkatan tersebut dirasa tidak cukup berarti. Hal ini

ditunjukkan dengan relatif kecilnya angka peningkatan pengeluaran riil per kapita Propinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian. Pada periode tahun 2001-2005 kenaikan pengeluaran riil per kapita DI Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar Rp 72.200,-

REKOMENDASI

Pemerintah daerah seyogyanya:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar tercipta iklim yang kondusif yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor yang terkait.
2. Pencanaan wajib belajar 9 tahun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar setiap penduduk yang berusia 7-15 tahun dapat mengikuti pendidikan dalam jenjang pendidikan dasar.
3. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pada pemanfaatan fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah.
4. Meningkatkan pengeluaran riil per kapita masing-masing daerah melalui perluasan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi usaha di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001: Toward A New Consensus*. Jakarta: Bappenas & UNDP.
- . 2004. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Bappenas, UNDP & BPS.

----- . 2005, 2006. *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2004, 2005*. Semarang: BPS.

Abdul Haris dan Nyoman Andika. 2001. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: LESFI.

Aloysius Gunadi Brata. 2002. "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7(2).

David C. Korten. 1984. *People Centered Development*, BPS, Bappenas & UNDP, Indonesia Human Development Report (IHDR) 2001: *Toward A New Consensus*.

Lincoln Arsyad. 2004: *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Moeljanto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Todaro, Michael. 2001. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

UNSFIRS. 2000. "Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10(1): Juni 2002.

Penulis:

Nenik Woyanti adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi UNDIP yang telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Diponegoro tahun 2004. Alamat Rumah: Jalan Peterongan Tengah II No. 346 RT 03 RW 02 Semarang Email: neniwoyanti@yahoo.com (Hand Phone: 081 325 905030)